

Implementasi Kebijakan 5 Pilar Penurunan Stunting Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok

Jessyca Azzahra

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
jessycaazzahra22@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the implementation of the 5 pillars of stunting reduction policy and the factors that influence it in Nagari Paninggahan, Solok Regency. One of the pillars that has been implemented is a campaign with a focus on understanding, behavior change, political commitment and accountability. This study describes what are the supporters and obstacles in realizing the success of the pillars of the stunting reduction campaign. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Research informants were determined by purposive sampling. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies and data reduction is carried out so that accurate conclusions can be drawn from the data that has been obtained. The results showed that the implementation of the 5 pillars stunting reduction policy in the form of a campaign with a focus on understanding, behavior change, political commitment and accountability in Nagari Paninggahan, Solok Regency, there are several factors that support and hinder implementation, namely: adequate resources, support from the nagari government, facilities inadequate, limited funds, and lack of program supervision.

Keywords: implementation, inhibiting factors, supporting factors, stunting, Solok Regency.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 5 pilar penurunan stunting dan faktor yang mempengaruhinya di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. Salah satu pilar yang telah dilaksanakan yaitu kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. Penelitian ini menggambarkan apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keberhasilan pilar kampanye penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 5 pilar penurunan stunting dalam bentuk kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi yang yaitu :sumberdaya memadai, dukungan pemerintah nagari, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan dana, dan kurangnya pengawasan program.

Kata kunci: implementasi, faktor penghambat, faktor pendukung, stunting, Kabupaten Solok.

Pendahuluan

Stunting merupakan masalah kurang gizi serius yang disebabkan oleh minimnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama diakibatkan karena pemberian makanan yang tidak setara dengan kebutuhan gizi yang seharusnya didapatkan anak dimasa pertumbuhan. Stunting bisa terjadi semenjak janin masih dalam kandungan dan baru akan terlihat saat anak mulai berusia dua tahun (Kementrian PPN/Bappenas, 2018).

Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-17 dari 34 provinsi stunting di Indonesia dengan prevalensi balita (usia 24-59 bulan) stunting sebesar 36,2% lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 35,3%. Prevalensi stunting ini bisa saja meningkat jika faktor-faktor dari penyebab stunting tidak diperhatikan. Peranan dari keluarga atau pola asuh dari ibu sangat penting dalam pertumbuhan anak, hal tersebut juga berkaitan dengan sikap dan pengetahuan ibu tentang bagaimana pola gizi yang baik untuk pertumbuhan anaknya. Sanitasi lingkungan juga berpengaruh terhadap permasalahan stunting ini. Sanitasi lingkungan yang kurang baik memiliki resiko yang tinggi terhadap penyebab terjadinya stunting (Anggraini & Rusdy, 2019).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2019, ditetapkan bahwa Kabupaten Solok menjadi lokus stunting di Sumatera Barat. Kabupaten Solok menempati urutan ke tiga jumlah penderita stunting terbanyak di Sumatera Barat, setelah Pasaman dan Pasaman Barat. Tentunya hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Solok untuk menurunkan jumlah penderita stunting. Pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi jumlah penderita stunting. Pada tahun 2019, ada 10 nagari yang menjadi wilayah sasaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Solok. Diantaranya yaitu, Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, Aia dingin Kecamatan Lembah Gumanti, Batu bajaran, Koto laweh, Koto gadang Koto Anau di Kecamatan Lembang Jaya, Nagari Taruang-Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Tanjung Binkung Kecamatan Kubung, Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti, Sibarambang, serta Koto Hilalang (Postmetro Padang, 2020).

Disebabkan karena tingginya angka stunting di Kabupaten Solok, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, kemudian menetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perbup Kabupaten Solok No. 35 Tahun 2019, maka ditetapkan 5 pilar penurunan yaitu :1. Komitmen dan visi pimpinan daerah , 2. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas, 3. Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat, 4. Akses pangan bergizi dan keamanan pangan, 5. Pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih merupakan salah satu nagari yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Solok dengan jumlah penderita stunting sebanyak 152 anak, yang tersebar pada seluruh jorong. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dari 10 nagari lokus stunting lainnya.

Pada tahun 2019 Nagari Paninggahan menjadi daerah percontohan dalam pencegahan dan penurunan masalah stunting di Kabupaten Solok dengan dilaksanakan *launching* kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Nagari Paninggahan.

Namun demikian, implementasi 5 pilar penurunan stunting di Nagari Paningga-han Kabupaten Solok belum optimal, dilihat dari pelaksanaan pilar kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini, dilihat dari beberapa permasalahan dibawah ini: Pertama, gerakan kampanye untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini

menyebabkan tingginya angka stunting karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kedua, tingginya angka stunting di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok disebabkan karena belum adanya perubahan perilaku asupan gizi masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan makanan bergizi membuat mereka mengabaikan pentingnya asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak. Menurut wawancara Ketua PKK Kabupaten Solok yang dikutip dalam AntaraSumbar(2019) mengatakan bahwa masalah stunting atau tinggi badan anak tidak sesuai usia terjadi akibat kekurangan asupan gizi.

Ketiga, implementasi penurunan stunting di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok terkendala oleh faktor kemiskinan. Tingkat sosial ekonomi terutama penghasilan sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan hidup seseorang dan keluarga. Sehingga, kondisi ekonomi yang kurang baik mengakibatkan kurang terpenuhinya asupan gizi yang baik untuk anak.

Keempat, kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan makanan bergizi juga merupakan faktor penyebab stunting yang mengakibatkan anak semenjak dalam kandungan ibu mengalami kekurangan asupan gizi. Akibatnya anak akan mengalami stunting atau kekurangan gizi Kementrian Kesehatan RI(2018). Pentingnya pengetahuan ibu akan dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak, karena hal ini tidak terlepas dari keadaan gizi anak. Pengetahuan ibu yang cukup akan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menyerap informasi bila dibandingkan dengan ibu yang kurang memiliki pengetahuan Sulastri(2012).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam fenomena yang terjadi. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan karakteristik orang-orang yang benar-benar paham dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun informan penelitian ini yaitu Sekretaris Nagari Paninggahan, bidan desa, kader posyandu, nutrisionis puskesmas Nagari Paninggahan, staf ahli bidang informasi dan komunikasi publik Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Baranlitbang Kabupaten Solok, orang tua balita stunting. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan penurunan stunting merupakan permasalahan mendesak dan menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, jumlah penderita stunting memperlihatkan jumlah yang signifikan dan belum menunjukkan adanya penurunan yang pasti. Oleh karena itu, Implementasi kebijakan penurunan stunting dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menjelaskan sejauh mana upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mewujudkan capaian kebijakan.

Implementasi kebijakan penurunan stunting secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penderita stunting. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya koordinasi dan kerjasama

antar OPD Febrian, F., & Yusran, R.(2021); Belum optimalnya pelaksanaan konvergensi kebijakan Iqbal, M. & Yusran, R., (2021); dan terjadinya perubahan orientasi fungsional antara kebijakan pangan, ekosistem lingkungan yang berpengaruh pada kejadian stunting Yusran, R., et al.(2021).

Walaupun begitu, berdasarkan temuan di lapangan Implementasi kebijakan 5 pilar penurunan stunting dalam bentuk kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok juga dipengaruhi faktor-faktor lainnya, yaitu:

1. Faktor Pendukung

Kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam berbagai interaksi yang berlangsung. Tujuannya adalah dalam rangka mendorong kemudahan implementasi kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya yang memadai.

Implementasi kebijakan 5 pilar penurunan stunting dalam bentuk kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok memiliki faktor pendukung diantaranya. Pertama, adanya kebijakan daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman penurunan stunting. Hal ini berbeda dengan masa sebelum, dimana kebijakan penurunan stunting ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Kedua, tersedianyasumberdaya manusia yang memadaipelaksanaan kampanye penurunan stunting.Pelaksanaan kampanye penurunan stunting di Nagari Paninggahan dilaksanakan oleh pemerintah nagari sesuai dengan tupoksi yang ada lalu bekerjasama dengan puskesmas, bidan desa serta kader posyandu nagari paninggahan. Sedangkan Dinas Kominfo dalam melaksanakan program stunting seperti kampanye penurunan stunting juga didukung staf yang memadai misalnya dalam pembuatan videotron, konten youtube hingga penyebaran informasi mengenai stunting melalui media sosial.

Ketiga, dukungan pemerintah nagari. Pelaksanaan kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas didukung dengan baik oleh pemerintah nagari. Hal tersebut dapat dilihat dari dukungan yang selalu diberikan oleh pemerintah nagari terhadap bidan desa maupun kader posyandu dengan memfasilitasi kegiatan misalnya menyediakan salah satu ruangan yang ada dikantor wali nagari untuk digunakan. Selain itu, wali nagari juga ikut serta langsung dalam melaksanakan kegiatan kampanye penurunan stunting yang dilaksanakan oleh bidan desa serta kader posyandu. Selanjutnya, pemerintah nagari juga memberika dukungan dalam bentuk uang saku sebagai uang tambahan diluar gaji kepada kader posyandu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye penurunan stunting.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal yang dapat menghalangi pelaksanaan atau kemajuan implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan 5 pilar penurunan stunting dalam bentuk kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya. Pertama, fasilitas yang kurang memadai. Agar suatu implementasi kebijakan terlaksana dengan baik makan dibutuhkan sumberdaya fasilitas yang memadai. Namun dalam pelaksanaan kampanye penurunan stunting fasilitas yang tersedia untuk kegiatan masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya pengeras suara yang di khususkan untuk

melaksanakan kegiatan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan harus mencari pinjaman peneras suara terlebih dahulu. Kemudian, tidak ada proyektor untuk menampilkan gambar sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang menarik serta kondisi posyandu yang kecil dan tidak dapat menampung semua orang tua balita dalam pelaksanaan kampanye penurunan stunting. Disebabkan fasilitas yang kurang memadai sehingga pelaksanaan kampanye penurunan stunting yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan pihak nagari hanya dilaksanakan dengan alat seadanya saja. Sehingga, kekurangan sumberdaya fasilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kampanye penurunan stunting di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok.

Kedua, keterbatasan dana, sumberdaya dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tetapi, dalam pelaksanaan kampanye stunting sumberdaya dana masih minim dikarenakan tidak adanya anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kampanye penurunan stunting. Kemudian dana yang digunakan untuk pelaksanaan kampanye penurunan stunting hanya seadanya saja. Karena minimnya dana yang tersedia maka kampanye penurunan stunting belum terlaksana sesuai tujuan dari kebijakan yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye penurunan stunting keterbatasan dana menjadi salah satu faktor pengambah keberhasilan implementasi kebijakan.

Ketiga, kurangnya pengawasan program. Pengawasan dalam pelaksanaan suatu program merupakan hal yang penting, dengan adanya pengawasan yang dilakukan pelaksanaan suatu program membuat program tersebut lebih mudah untuk dievaluasi agar capaian dari program lebih baik. Dalam kampanye penurunan stunting pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait masih belum terlaksana. Dinas terkait tidak melakukan pengawasan dari kegiatan kampanye penurunan stunting ke Nagari Paninggahan disebabkan karena tidak adanya dana khusus untuk turun ke nagari-nagari lokus stunting sehingga pengawasan dari pelaksanaan kampanye hanya dilakukan oleh pihak nagari saja. Karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait kepada pemerintah nagari dalam pelaksanaan kampanye penurunan stunting mengakibatkan kurangnya capaian dari tujuan kebijakan. Hal ini menyebabkan kurangnya perkembangan dari kegiatan kampanye penurunan stunting dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Kesimpulan

Kebijakan penurunan stunting di kabupaten Solok merupakan bagian penting dari upaya mengurangi penderita stunting yang jumlahnya mencaai hingga 30% lebih. Dalam hal ini, implementasi kebijakan 5 pilar seharusnya dapat menjadi alternatif mendasar di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Sebaiknya dapat memperkuat kerjasama dan kapasitas kelembagaan pelaksana kebijakan dan lembaga non forman lainnya yang memiliki peranan strategis. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai melalui kebijakan tertentu.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Y., & Rusdy, P. H. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*.
- AntaraSumbar. (2019). *Ketiga terbanyak di Sumbar, Kabupaten Solok prioritaskan penanganan stunting*. Retrieved Desember 10, 2020, from <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/257537/ketiga-terbanyak-di-sumbar-kabupaten-solok-prioritaskan-penanganan-stunting>

- Islamy, M. I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Kesehatan RI. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksana Intervensi Penurunan Stunting Terintegritas di Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Posmetro Padang. (2020). *Pemkab Komit Tekan Stunting*. Retrieved Desember 5, 2020, from <https://posmetropadang.co.id/pemkab-komit-tekan-stunting/>
- Sulastri, D. (2012). Faktor Determinan Kejadin Stunting Pada Anak Usia Sekolah Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota padang. *Majalah Kedokteran Andalas*.
- TNP2K. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggula-ngan Kemiskinan (TNP2K).
- Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 109-116
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 11-21.
- Yusran, R., Barlian, E., Fatimah, S., Umar, I., & Razak, A. (2021). Reconnection of Food Policy, Environmental Ecosystem and Its Impact on Stunting Prevalence. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(7), 47-52.